

Gelar Rapat Internal di Istana, Indonesia Semakin Siap Berproses Menjadi Anggota OECD



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/170/SET.M.EKON.3/05/2024

Gelar Rapat Internal di Istana, Indonesia Semakin Siap Berproses Menjadi Anggota OECD

Jakarta, 16 Mei 2024

Sejak tahun 2007 Indonesia telah menjadi mitra The Organisation for *Economic Co-operation and Development* (OECD), bersama Brasil, India, RRT, dan Afrika Selatan. Di Asia Tenggara sendiri, OECD telah meluncurkan *South East Asia Regional Program* di tahun 2014.

Pada pertemuan *Ministerial Council Meeting* (MCM) OECD yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris 2 minggu lalu dalam rangka 10 tahun *South East Asia Regional Program*, OECD menerima permohonan Indonesia dan Argentina. Terhitung hingga pertemuan tersebut berlangsung, Argentina telah berproses selama 5 tahun, sedangkan Indonesia telah berproses selama 7 bulan sejak surat yang dikirim OECD.

“Nah sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Mereka sudah berproses rata-rata lebih dari 2 tahun. Bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun. Nah, Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/05).

Beberapa negara yang sudah berhasil dalam proses aksesinya dan menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang tidak singkat, contohnya Kosta Rika butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, dan Chile 3 tahun. “Jadi kita harus belajar dari Chile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat. Kita targetnya 3 tahun, sama seperti Chile,” ungkap Menko Airlangga.

Setelah menjalani proses aksesinya, pada proses berikutnya Indonesia perlu mengeluarkan memorandum. Memorandum dimaksud akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh *Steering Committee* yang ada di OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang lebih detail terkait *consumer policy*, *digital economy*, *technology policy*, *steel committee*, termasuk juga *shipbuilding*. Untuk membangun memorandum akan diberikan waktu sekitar 250- 280 hari.

“Nah untuk itu, tadi arahan Pak Presiden, kita akan membentuk PMO di bawah kantor Kemenko. Di mana itu akan mencapai seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang menjadi bagian dari OECD. Dan Sekretaris Jenderal Cormann akan segera ke Indonesia akhir bulan ini, tentunya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga melaporkan terkait dengan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF), yang terdiri dari 4 pilar. Saat ini Indonesia telah menyelesaikan negosiasi terhadap Pilar Kedua, yakni terkait *supply chain*. Presiden Joko Widodo memberi arahan agar ratifikasi terhadap *supply chain* segera dilakukan melalui

Perpres.

Kemudian, Pemerintah telah menyelesaikan 5 dari 11 klaster dalam Pilar Pertama mengenai perdagangan yang direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2024. “Dan ini yang belum selesai adalah terkait dengan *labor, enviroentment, digital economy*, dan juga *trade facilitation* dan *competition policy*. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan cuma Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan akan ada penyelesaian Pilar Ketiga mengenai *clean economy*, yang telah menyelesaikan legal reviu dan akan ditandatangani tanggal 6 Juni nanti. Demikian halnya dengan Pilar Keempat mengenai *fair economy* yang juga akan ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2024.

“Dan oleh karena itu, berikutnya kita akan mempersiapkan *Critical Mineral Dialogue*, kemudian *Cooperative Work Program*, dan *Clean Economic Investor Forum*,” imbuh Menko Airlangga.

Dalam *Clean Economic Investor Forum* tersebut Indonesia mengajukan beberapa project. Ada 17 project yang dokumentasinya sudah dianggap selesai, seperti *geothermal, green refinery, sorghum to biofuel*, hingga *blue ammonia*.

Selain itu, semikonduktor turut menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut mengingat semikonduktor menjadi bagian yang strategis selain *critical mineral*. “Semikonduktor ini penting karena dalam OECD salah satunya juga mengirim *fact-finding misson* mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia di pertengahan tahun ini,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kembali ekosistem semikonduktor. Hal utama dari industri semikonduktor adalah *chip design*, yang membutuhkan ahli di bidang mikroelektronik. Oleh karena itu, LPDP akan didorong untuk dapat memberikan beasiswa, juga melakukan *training for the trainer*.

Keterlibatan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi investasi maupun *best practice* secara global. Dengan begitu, Menko Airlangga percaya Indonesia akan masuk ke dalam ekosistem semikonduktor global. (map/fsr)

**Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia